

Lembar Berita Elektronik FPP: Mei 2014



Forest
Peoples
Programme

Lembar Berita Elektronik FPP: Mei 2014

Dokumen ini memiliki “akses terbuka”, Anda bebas untuk membuat kopi dari situs kami. Anda juga diijinkan untuk mereproduksi teks di sini dengan mencantumkan rujukan/ucapan terima kasih kepada FPP.

Berlangganan Lembar Berita Elektronik FPP

Jika Anda belum melakukannya, Anda dapat berlangganan Lembar Berita Elektronik FPP dengan mengklik di [sini](#) atau dengan mengirim surel ke kate@forestpeoples.org. Lembar Berita ini dikeluarkan dua bulan sekali; Anda juga mungkin akan sering menerima tambahan berita atau laporan lainnya. Anda dapat menghentikan langganan setiap saat dengan mengklik tautan berhenti berlangganan yang ada di tiap pengiriman.



Forest Peoples Programme

1c Fosseyway Business Centre, Stratford Road

Moreton-in-Marsh

GL56 9NQ

United Kingdom

Tel: +44 (0)1608 652893

info@forestpeoples.org

www.forestpeoples.org

© Forest Peoples Programme

Foto sampul muka: Upacara adat untuk penyambutan oleh Dayak Ngaju di Desa Gohong © Sophie Chao FPP

Teman-teman yang baik,

Masyarakat hutan mengadakan pertemuan di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia, di bulan Maret tahun ini, melaporkan hilangnya hutan yang terus terjadi dan ancaman serius terhadap hak-hak dan kesejahteraan mereka. Mendengarkan perwakilan masyarakat berbicara tentang perjuangan yang mereka hadapi untuk mengamankan tanah dan hutan mereka merupakan pembelajaran secara langsung tentang ekonomi politis hutan yang nyata di berbagai negara saat kepentingan internasional, nasional dan lokal berlomba mempengaruhi hukum dan kebijakan nasional dan nasib hutan. Warisan hukum kehutanan kolonial yang menempatkan hutan masyarakat di bawah kendali negara dan pelucutan hak-hak adat dan pengelolaan hutan dari masyarakat hutan terus meningkatkan krisis kehutanan.

Kami, masyarakat hutan, tengah didesak sampai batas daya tahan kami hanya untuk bisa bertahan hidup. Menghentikan deforestasi membutuhkan penghormatan atas hak-hak dasar kami, yang juga merupakan hak-hak seluruh masyarakat dan manusia. Deforestasi marak ketika hak-hak kami tidak dilindungi dan tanah dan hutan kami dirampas oleh kepentingan industri tanpa persetujuan kami. Bukti-bukti sangat kuat bahwa ketika hak-hak kami terjamin maka deforestasi dapat dihentikan dan bahkan dibalikkan.

Deklarasi Palangka Raya menyerukan hak dan keadilan di jantung upaya deforestasi, dan mencatat kurangnya keberhasilan inisiatif global untuk mengatasi deforestasi lewat mekanisme-mekanisme yang gagal menanggapi berbagai nilai hutan dan keunggulan masyarakat hutan dalam pengelolaan dan perlindungan hutan.

“Di dasar seluruh pengrusakan dan pelanggaran ini terletak masalah fundamental kurangnya penghormatan terhadap hak-hak kami atas tanah dan wilayah, tata kelola mandiri kami, lembaga kami sendiri, hukum adat dan cara hidup kami yang khas yang didasarkan pada hubungan akrab kami yang telah lama terjalin dengan hutan dan bagaimana mencari nafkah dari hutan tanpa merusaknya. Terlalu sering cara hidup kami dan sistem pengetahuan kami dipandang terkebelakang dan kami dapati kami mengalami diskriminasi dalam seluruh hubungan kami dengan masyarakat nasional dan internasional.”

Para peserta berkomitmen untuk bekerja dalam solidaritas dalam sebuah jaringan akuntabilitas akar rumput global untuk secara independen memantau, mendokumentasikan, menantang dan mengecam kerusakan hutan dan pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengannya atas hak-hak masyarakat hutan.

Sementara itu, berbagai upaya terkait isu kehutanan dan iklim tingkat global, misalnya Pendanaan Karbon Hutan (Forest Carbon Fund) milik World Bank, tetap gagal untuk memastikan partisipasi masyarakat hutan secara total dan efektif. Tidak diragukan lagi bahwa masyarakat-masyarakat dan aliansi mereka perlu mengawasi dan mempertanyakan program-program ini karena berbagai program tersebut memarginalkan masyarakat dan mengancam cara hidup mereka (lihat artikel tentang FCPF dan RDK)

Pemantauan hutan masyarakat dan pemetaan partisipatif yang didasarkan pada pengetahuan adat dan pengetahuan lokal telah dilakukan selama bertahun-tahun oleh masyarakat. Pengalaman dan pelajaran yang didapat dari kerja-kerja tersebut dibagikan dan didiskusikan dalam sebuah lokakarya peningkatan kapasitas yang baru-baru ini diselenggarakan di Chiangmai, Thailand. Para peserta lokakarya juga dilatih dalam penggunaan teknologi GIS untuk mendukung pengelolaan sumber daya masyarakat dan perencanaan penggunaan lahan lewat pembuatan data yang dikontrol masyarakat, analisis informasi dan pendidikan kenegaraan dan lingkungan.

Lembar berita ini juga berisi data terbaru tentang pendekatan baru Bank Dunia mengenai Keterlibatan Negara serta publikasi baru bertajuk ‘Mewujudkan Hak-Hak Perempuan Adat: sebuah panduan untuk CEDAW’.

Joji Cariño, Direktur

1. Determinasi dan resiliensi; seruan masyarakat hutan untuk mengamankan keberadaannya dan melawan deforestasi

“Saat hutan hancur, cara hidup dan bahasa lenyap: Itu adalah salah satu bentuk genosida budaya”.

Peringatan mengkhawatirkan ini, yang diserukan oleh perempuan adat dari masyarakat Camentsa (Kolombia) dalam pertemuan internasional [Palangka Raya](#) tentang Faktor-faktor yang Mempengaruhi Deforestasi dan Hak-Hak Masyarakat Hutan, menyuarakan keprihatinan setiap peserta pertemuan: Meskipun prakarsa [internasional untuk menghentikan laju deforestasi](#) telah menguat, namun pada tahun 2012 saja, lebih dari [20 juta hektar hutan dibuka](#). Pertemuan di Palangka Raya, Kalimantan, Indonesia (9-14 Maret 2014) menunjukkan bahwa walaupun banyak keprihatinan internasional tentang krisis lingkungan dan iklim yang terjadi saat ini, namun masyarakat hutan mengalami penderitaan karena terjadinya invasi terhadap tanah-tanah dan wilayah mereka serta pengrusakan terhadap sumberdaya hutan yang mana seluruh cara hidup dan kelangsungan hidup mereka bergantung padahal-hal tersebut. Untuk itu, masyarakat hutan memanfaatkan kesempatan dalam pertemuan satu minggu tersebut untuk memperkuat hak-hak mereka, berupaya mendapatkan ganti rugi atas pelanggaran/kekerasan--mengamankan masa depan mereka--dan mencari cara-cara konkret untuk melawan deforestasi bekerjasama dengan organisasi-organisasi masyarakat sipil dan perwakilan lembaga-lembaga internasional,.

Lebih dari 60 perwakilan masyarakat hutan dari Indonesia, Malaysia, Kamerun, Liberia, Republik Demokratik Kongo, Paraguay, Peru, Kolombia dan Guyana datang ke Palangka Raya untuk berbagi pengalaman lapangan mereka. Di masing-masing negara

tersebut, masyarakat hutan menghadapi perampasan tanah oleh pembangunan agribisnis (terutama dari ekspansi yang cepat oleh kelapa sawit), kayu, tenaga air, pengeboran minyak dan gas, pertambangan skala besar dan skema-skema pembangunan lahan lain yang dilakukan di atas wilayah leluhur mereka tanpa ‘keputusan bebas (tanpa paksaan), didahulukan dan diinformasikan’ (KBDD/FPIC) mereka. Mereka diusir dari tanah mereka, dirampas sumber-sumber daya dan sarana subsistennya, dihancurkan desa-desanya dan ketika mereka melakukan protes atas pelanggaran hak-hak asasi mereka, mereka dibungkam dengan keras. Dengan model pembangunan haus sumber daya dan berorientasi ekspor terus berlangsung, pelanggaran-pelanggaran ini mendapat justifikasi pemerintah sebagai kepentingan nasional, padahal mereka sungguh-sungguh melemahkan tata kelola dan supremasi hukum.



Gambar 1 Perempuan adat Bagyéli menegaskan pelanggaran hak-hak asasi masyarakatnya sebagai akibat dari deforestasi yang terkait dengan pembangunan infrastruktur Barat Daya Kamerun

Lewat deforestasi, keberadaan masyarakat hutanlah yang secara terus menerus diabaikan dan terancam. Seperti yang ditegaskan salah seorang perwakilan masyarakat adat dari Papua dalam pertemuan tersebut,

“Adalah mengejutkan bahwa hari ini, kita masih dalam posisi harus mengingatkan para pembuat kebijakan dan sektor swasta bahwa hutan itu ada penghuninya”:

[Negara-negara berhutan tropis adalah tempat tinggal bagi sekitar 500 juta orang yang bergantung](#) pada hutan di mana setidaknya 200 juta di antaranya adalah penduduk asli. Identitas keseluruhan masyarakat hutan didasarkan pada hubungan mereka dengan lingkungan hutan:

“Tanpa hutan, kita Orang Asli dirampas semangat dan hidup kita, dan karenanya juga identitas kita, yang lebih buruk daripada menjadi penghuni liar atau pendatang ilegal di tanah sendiri” (penjaga hutan kemasyarakatan, Malaysia).

Hilangnya hutan terus meningkat meskipun ada upaya global untuk menghentikan deforestasi, melalui lembaga-lembaga seperti Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim ([UNFCCC](#)), Program Kolaboratif PBB tentang Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan ([UNREDD](#)) dan Bank Dunia. Inisiatif-inisiatif ini gagal karena mereka tidak mengakui dan tidak melindungi hak-hak masyarakat hutan secara efektif. Terlalu sering skema-skema ini memiliki fokus yang sempit pada upaya melindungi hutan dengan [menerapkan kawasan konservasi di atas lahan masyarakat hutan](#), yang sering kali menyangkal hak-hak masyarakat yang telah mendiami dan menjaga hutan tersebut selama berabad-abad.

Sebagaimana ditegaskan Noerhadi, mewakili masyarakat adat dari Kapuas, Indonesia:

“Kita sangat perlu mengatasi kontradiksi antara inisiatif pemerintah yang berusaha mengeksploitasi hutan dan mengambil tanah dari masyarakat, dengan inisiatif konservasi seperti skema REDD. Keduanya mencari lahan dan hutan, tetapi terus menerus mengecualikan masyarakat setempat.”

Upaya menahan laju deforestasi mensyaratkan lembaga-lembaga internasional, masyarakat sipil, pembuat kebijakan dan masyarakat hutan untuk bekerja sama untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat hutan dijamin dan bahwa pengetahuan, keyakinan, institusi, dan hukum adat mereka digunakan untuk memandu pengelolaan hutan.

“Masyarakat telah membuktikan kemampuan untuk mengelola hutan selama beberapa generasi,”

kata Edy Subahani dari POKKER SHK Kalteng, Indonesia, salah satu lembaga penyelenggara.

“Mereka memiliki pengetahuan yang inovatif untuk melindungi hutan dan mengembangkan makanan dan mata pencaharian ekonomi serta kehidupan spiritual di dalam hutan. Mereka juga berkontribusi di tingkat lokal dan nasional dan berpartisipasi dalam pemulihan hutan yang rusak. Pemerintah harus memberdayakan dan mengembangkan keterampilan dan pengetahuan komunitas-komunitas ini.”

Dengan tekad lebih besar dari sebelumnya untuk mengamankan cara hidup tradisional mereka dan memandang ke depan untuk mencari tindakan nyata dan segera untuk mengurangi deforestasi, perwakilan masyarakat hutan menyatukan seruan mereka kepada pemerintah, sektor swasta, lembaga keuangan, lembaga internasional dan masyarakat internasional melalui [Deklarasi Palangka Raya](#), yang mendesak semua pihak terkait untuk:

- Menghentikan produksi, perdagangan dan konsumsi komoditas yang berasal dari deforestasi, perampasan lahan dan pelanggaran lainnya terhadap hak-hak masyarakat hutan;
- Menghentikan invasi ke tanah dan hutan masyarakat hutan oleh proyek-proyek agribisnis, industri ekstraktif, infrastruktur, energi dan “ekonomi hijau” yang menyangkal hak-hak dasar masyarakat hutan;
- Mengambil tindakan segera dan konkret untuk menegakkan hak-hak masyarakat hutan di semua tingkatan termasuk hak atas tanah, wilayah dan sumber daya, hak atas pembangunan yang ditentukan sendiri dan hak untuk terus memiliki, mengontrol dan mengelola tanah adat mereka sesuai dengan pengetahuan dan mata pencaharian mereka.



Gambar 2 Perwakilan Masyarakat Hutan Papua mencela pengabaian oleh sektor swasta atas keberadaan mereka.

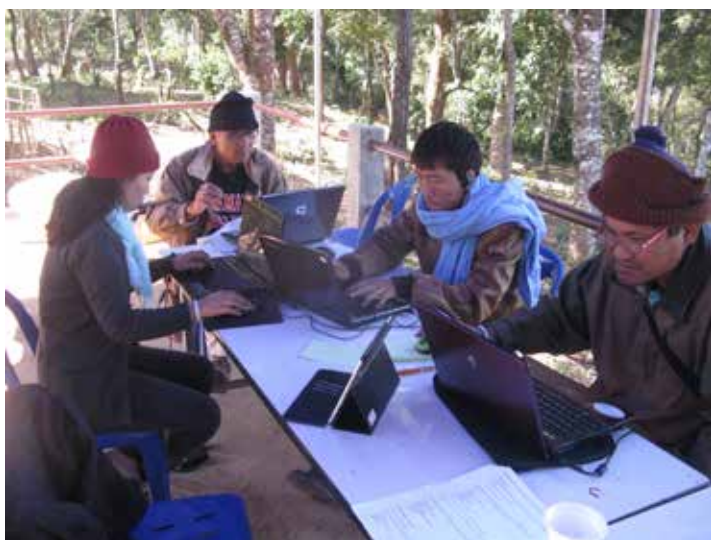
Deklarasi tersebut sungguh-sungguh mencatat beberapa kemajuan. Di beberapa negara di [Amerika Latin](#) dan Asia Tenggara, kemajuan telah dibuat untuk merevisi Konstitusi dan mengadopsi undang-undang baru yang menghormati hak-hak masyarakat adat, mereformasi penguasaan hutan dan mendorong pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Deklarasi tersebut juga menyambut baik janji-janji terbaru dari perusahaan swasta untuk mereformasi cara mereka menjalankan usahanya, dalam rangka untuk menghentikan keterlibatan mereka dalam deforestasi dan menghormati hak-hak sesuai dengan [Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia](#). Meskipun demikian, peserta pertemuan menyoroti kesenjangan yang amat besar antara apa yang tertulis di atas kertas dan apa yang dilaksanakan di lapangan.

Para perwakilan masyarakat hutan menekankan perlunya Deklarasi dan rekomendasi-rekomendasi rinci tersebut diedarkan dan dipertimbangkan dengan cermat dalam acara-acara internasional yang akan datang, termasuk pertemuan-pertemuan UNFCCC berikutnya yang akan diadakan di Lima dan Paris pada tahun 2014 dan 2015, dan Konferensi PBB tentang Masyarakat Adat (UNWCIP) pada bulan September 2014. Para peserta berjanji untuk bekerja sama dalam solidaritas untuk membentuk jaringan akuntabilitas akar rumput global untuk secara mandiri memantau, mendokumentasikan, menantang dan mengancam perusakan hutan dan pelanggaran hak-hak masyarakat hutan terkait, yang menunjukkan kehendak dan ketahanan tanpa henti mereka untuk menegaskan dan mengamankan cara hidup tradisional mereka.

Beata Delacourt

2. Mitra FPP mengikuti pelatihan “darimasyarakat untuk masyarakat” mengenai pemantauan dengan GIS Cloud

Salah satu fitur yang semakin meningkat dari kerja FPP dengan masyarakat hutan adalah mendukung mereka untuk memantau kesejahteraan komunitas mereka dan keadaan wilayah mereka, misalnya kesehatan keanekaragaman hayati, dampak perubahan iklim, atau dampak dari aktivitas yang tidak ramah lingkungan seperti pembalakan liar atau penambangan. Masyarakat juga memantau implementasi kesepakatan-kesepakatan keanekaragaman hayati, iklim, pembangunan dan hak asasi manusia internasional di tingkat nasional atau lokal. Walaupun kegiatan untuk melacak apa yang tengah terjadi di dalam tanah masyarakat hutan itu sendiri bukanlah sesuatu yang baru, namun perhatian internasional yang berkembang terhadap ‘pemantauan dan sistem informasi berbasis masyarakat (CBMIS/community-based monitoring and information systems)’ merupakan hal yang tidak banyak terjadi sebelumnya. Di samping itu, pengakuan para pembuat kebijakan, akademisi, dan lembaga konservasi dan pembangunan internasional, bahwa masyarakat adat dan komunitas lokal memiliki kontribusi penting terhadap penilaian global dan inisiatif pemantauan dikarenakan pengetahuan dan hubungan mereka yang mendalam dengan tanah dan sumber daya mereka, juga merupakan suatu hal yang baru yang sebelumnya tidak banyak terjadi.



“Mitra-mitra FPP mengikuti pelatihan tentang teknologi pengamatan, Khun Tae, Thailand”

Salah satu dimensi ‘baru’ dari pemantauan adalah yang berkaitan dengan penggunaan teknologi baru yang dapat diakses, murah dan mudah, yang memungkinkan masyarakat untuk menghasilkan, menganalisis, menyimpan dan memproses data-data mereka ke dalam peta dan produk keluaran lainnya, dengan mengkombinasikan pengetahuan tradisional dan alat dan pendekatan inovatif. FPP mendukung para mitra untuk membiasakan diri mereka dengan pendekatan-pendekatan baru tersebut dan untuk menerapkan dan mendapatkan keuntungan dari pendekatan tersebut.



Salah satu contoh adalah pelatihan praktik CBMIS yang diselenggarakan bagi sejumlah mitra erat FPP di desa Khun Tae dan Chiang Mai, Thailand utara, pada bulan Januari tahun ini. Pelatihan ini difasilitasi oleh Ms Tui Shortland dari masyarakat Ngati Hine di Aotearoa/Selandia Baru. Beliau berbagi pengalaman pemantauan yang dimiliki masyarakat Ngati Hine serta alat-alat yang mereka pilih. Masyarakat Ngati Hine telah mengembangkan sebuah inisiatif pemantauan yang sistematis dan canggih beberapa tahun yang lalu, untuk memantau berbagai perubahan yang terjadi dalam lingkungan mereka dan untuk menjamin kelimpahan spesies untuk memelihara mata pencaharian masyarakat Nhati Hine. Inisiatif ini telah membantu mereka untuk merevitalisasi pengetahuan tradisional mereka dan untuk mengambil peran aktif dalam pengelolaan sumber daya yang melibatkan semua kelompok dalam komunitas, termasuk generasi muda.

CBMIS dapat dilakukan dengan berbagai instrumen dan saat ini banyak program telah tersedia, dan program-program baru terus diciptakan sehingga setiap komunitas dapat menilai program yang mana yang paling cocok untuk mereka. Dalam pelatihan ini para mitra

bekerja dengan perangkat tablet (karena masyarakat Ngati Hine merasa lebih mudah untuk mengerjakan peta dan bentuk-bentuk pada layar yang lebih luas dibandingkan dengan ponsel pintar) dan belajar untuk bekerja dengan sebuah program yang disebut GIS Cloud, yang direkomendasikan oleh masyarakat Ngati Hine karena kemampuannya untuk mengumpulkan data dan memasukkannya langsung ke dalam peta dalam program yang sama, tanpa harus mengekspor file berisi bentuk (shape file) ke program GIS eksternal. Peta, lapisan (layer) dan borang-borang pengumpulan data dapat dibuat dengan fungsi editor peta, dan kemudian ada aplikasi GIS Cloud yang dapat digunakan di lapangan untuk mengumpulkan data, dengan menggunakan borang-borang yang telah dibuat (secara offline dan lalu diunggah ke dalam peta kemudian atau langsung pada saat itu juga jika ada koneksi internet).

Mitra yang menghadiri pelatihan belajar tentang dua fungsi GIS Cloud dan berlatih di lapangan, dan mencari peta dasar wilayah mereka sendiri. Sang pelatih mengadakan sesi one on one, atau satu pelatih-satu peserta, dengan masing-masing mitra untuk membahas potensi prioritas-prioritas pemantauan dan memberikan nasihat dan bimbingan tentang bagaimana menerjemahkannya ke dalam bentuk dan lapisan (layer) dalam program ini. Diskusi bersama juga digelar untuk bertukar pengalaman mengenai pemantauan yang telah dilakukan mitra kerja (termasuk penggunaan lahan, penguasaan lahan dan keanekaragaman hayati), alasan untuk pemantauan, dan isu-isu penting seperti perlindungan dan penyimpanan data. Perlindungan data dan akses ke, serta berbagi, informasi merupakan hal penting yang perlu dibahas dan disepakati bersama sebelum memulai pengumpulan data. Misalnya, yang berkaitan dengan situs keramat atau data yang sensitif secara budaya atau data-data privat.

Secara umum latihan tersebut dipandang sangat menarik dan berguna, meskipun pelatihan ini jelas merupakan pengantar yang membutuhkan tindak lanjut dan praktik lebih lanjut. Salah satu komentar penting yang diutarakan para peserta adalah bahwa dengan alat-alat modern siapapun di dalam komunitas dapat mengumpulkan data, dan karenanya hal tersebut tidak lagi merupakan ranah 'pakar' eksternal. Salah seorang peserta menekankan bahwa, "Pengumpulan data harus diputuskan oleh komunitas dan dikendalikan dan dimiliki oleh mereka".

Tautan: www.giscloud.com

Caroline De Yong

3. Bagaimana Bank Dunia akan merancang kerja-kerjanya di masa depan

Sebagai bagian dari perubahan dan reformasi yang tengah berlangsung di Bank Dunia di bawah kepemimpinan Dr Jim Kim, Bank Dunia baru-baru ini mempublikasikan, dan memulai konsultasi tentang sebuah proses kebijakan baru dan penting yang mereka sebut “pendekatan baru terhadap Keterlibatan Negara”. Proses ini merupakan sebuah metode dua langkah di mana Bank Dunia akan merancang semua intervensi dan aktivitasnya di suatu negara.

Di masa lalu, penilaian situasi di suatu negara di mana Bank Dunia melakukan investasi dan memberikan hibah dilakukan melalui dokumen kebijakan yang menyeluruh (over-arching) yang disebut Country Assistance Strategy (CAS). Dokumen ini dimaksudkan untuk menyediakan sebuah kerangka kerja bagi semua keputusan investasi dan kredit. Namun, sistem CAS yang lama dikritik karena tidak mengakui kendala dan keterbatasan, yang mempengaruhi kemampuan Bank Dunia untuk ‘memberikan manfaat’ atau untuk mengurangi kemiskinan, dan karena terlalu fokus pada pertumbuhan ekonomi dengan mengesampingkan bidang-bidang atau sektor-sektor investasi atau pinjaman lainnya.

Sistem baru ini dirancang sebagai proses dua langkah. Langkah pertama, sebuah ‘diagnosis sistematis negara’ awal dilakukan untuk mengidentifikasi kendala dan peluang bagi Bank Dunia. Langkah kedua adalah kerangka kemitraan negara, yang merupakan sebuah dokumen di mana keputusan investasi dibuat dan panduan untuk investasi atau pinjaman masa depan disediakan.

Tinjauan terhadap proses penting mengenai penentuan untuk menilai situasi di negara-negara peminjam iniberpotensi menyediakan sebuah kesempatan untuk memperbaiki beberapa kegagalan jangka panjang Bank Dunia. Kesempatan tersebut mungkin berupa sebuah cara di mana perhatian akan dan keterbatasan hak asasi manusia dapat secara resmi diakui dan dinilai sebagai risiko bagi Bank Dunia, dan dapat mempengaruhi keputusan investasi. Mungkin hal ini dapat menjadi sebuah proses di mana masyarakat adat dan para pemeg-

ang hak lainnya di suatu negara dapat memiliki akses langsung ke analisis yang digunakan Bank Dunia untuk mengalokasikan sumber-sumber daya penting miliknya.

Meskipun demikian, hasil positif apapun tergantung pada proses konsultasi yang terbuka, transparan, mudah diakses dan adil. Kami, bersama dengan organisasi-organisasi lain, menyerukan Bank Dunia untuk memastikan standar minimum yang ketat bagi masukan dari publik ke setiap diagnosis strategis negara. Amatlah penting bahwa masyarakat adat dan kelompok-kelompok lain, yang mungkin terkena dampak dari portofolio investasi dan pinjaman Bank Dunia, mampu memberikan masukan langsung ke dokumen menyeluruh yang penting ini. Demikian pula pengembangan kerangka kemitraan negara harus dirancang berdasarkan standar konsultasi dan partisipasi tertinggi, di mana masukan yang bermakna didapat dari stakeholder dan pemegang hak utama di masing-masing negara.

[Surat masyarakat sipil](#)

Halaman konsultasi Bank Dunia: <http://consultations.worldbank.org/consultation/towards-country-partnership-framework>

Helen Tugendhat

4. Model yang ramah lingkungan atau rencana kehutanan secara top down untuk Republik Demokratik Kongo?

Dana Karbon Hutan Bank Dunia menyetujui Konsep Pengurangan Emisi di tengah kekhawatiran akan dampaknya pada hak dan mata pencaharian

Pertemuan Kesembilan Dana Karbon FCPF yang diadakan pada 9-11 April di Brussels menyetujui Nota Gagasan Program Pengurangan Emisi (ER-PIN) yang kontroversial bagi Republik Demokratik Kongo (DRC), meskipun kekhawatiran-kekhawatiran serius diajukan oleh organisasi-organisasi internasional, termasuk FPP, atas potensi dampak sosial negatif yang serius yang mungkin ditimbulkannya. ER-PIN DRC ini telah disetujui bersama proposal-proposal dari Ghana, Meksiko dan Nepal, sedangkan ER-PIN dari Republik Kongo dan Chili akan kembali dipertimbangkan pada pertemuan Dana Karbon berikutnya pada bulan Juni 2014.

Model yang ramah lingkungan?

Proposal ER-PIN DRC meliputi area seluas 12,3 juta hektar di Distrik Mai-Ndombe (nantinya akan menjadi provinsi), dimana program REDD yang direncanakan akan secara langsung mempengaruhi mata pencaharian sekitar 1,5 dan 1,8 juta penduduk hutan dan masyarakat pedesaan, termasuk para pemburu dan pengumpul, petani kecil yang mempraktikkan pertanian bergilir dan penghasil 'arang semak' (bush charcoal). ER-PIN menggambarkan proyek percontohan ini sebagai sebuah "model program pembangunan hijau provinsi yang memberikan alternatif dan penghargaan bagi upaya penanganan tantangan perubahan iklim, pengentasan kemiskinan, konservasi sumber daya alam dan perlindungan keanekaragaman hayati". Menurut rencana yang ada dalam ER-PIN intervensi ini akan terdiri dari:

- Wanatani di lahan terdegradasi untuk memproduksi makanan dan kayu bakar secara

berkelanjutan.

- Intensifikasi pertanian dan penghentian praktik pertanian tebang bakar (penekanan ditambahkan)
- Pengendalian kebakaran semak (diharapkan adanya regenerasi utama hutan primer).
- Reboisasi
- Hutan kemasyarakatan dan konservasi
- Insentif untuk RIL, sertifikasi hutan, dll

Meskipun sebagian wartawan memuji proposal DRC sebagai model untuk "[pembangunan hijau](#)" dan memuji persetujuan FCPF baru-baru ini atas ER-PIN sebagai "titik balik dari musyawarah kebijakan teoritis yang luhur menjadi tindakan nyata di lapangan untuk menyelamatkan paru-paru planet dan iklim global kita", NGO lokal dan internasional telah menyuarakan keprihatinan besar atas perlakuan buruk FCPF terhadap hak, mata pencaharian dan pembagian manfaat dalam proses pengembangan ER-PIN DRC.

Potensi pelanggaran hak dan risiko kemiskinan

Meskipun kebutuhan untuk menghormati hak-hak tanah adat telah ada dalam ER-PIN DRC, proposalnya tidak memiliki cukup rencana yang solid untuk menegakkan hak-hak penguasaan adat dan mengamankan hutan masyarakat. Sebuah tinjauan kritis atas ER-PIN yang dilakukan oleh FERN dan FPP mengkritik dengan keras FCPF karena gagal untuk memastikan adanya analisis risiko sosial dan kemiskinan yang kuat sebagai bagian dari rancangan proyek. Kritik yang sama mengidentifikasi adanya kesenjangan yang serius yang membawa risiko munculnya dampak mata pencaharian dan sosial yang negatif terhadap masyarakat dan komunitas yang bergantung pada hutan, termasuk, antara lain:

- kurangnya komitmen yang jelas untuk menghormati FPIC masyarakat;
- cacat dalam penilaian deforestasi, terutama menyalahkan masyarakat atas kerusakan hutan;

- perlakuan yang lemah pada isu penguasaan lahan masyarakat yang mempengaruhi banyak orang yang tinggal di daerah bersangkutan, yang bergantung pada sumber daya hutan dan lahan untuk ekonomi subsisten mereka;
- rencana yang cacat untuk zonasi tata guna lahan, mata pencaharian dan aksi-aksi untuk membatasi kegiatan subsisten lokal.

Ada juga kekhawatiran besar bahwa proses konsultasi publik tentang ER-PIN dilakukan dengan terburu-buru dan mengalami cacat yang serius karena dokumen-dokumen penting, termasuk versi ER-PIN terbaru pada tahun 2014, tidak disediakan dalam bahasa Perancis sebelum pelaksanaan validasi. Selain itu, “validasi” resmi dari proposal akhir (yang disyaratkan oleh peraturan FCPF) tidak memungkinkan adanya kritik terbuka dari publik atau penolakan publik atas rencana ER-PIN, sehingga memunculkan pertanyaan-pertanyaan besar tentang kredibilitas pertemuan-pertemuan validasi tersebut.

Meskipun telah ada keterlibatan multi-pihak di beberapa tahapan pengembangan proposal, ada kelemahan yang jelas dalam proses konsultasi selama proses perancangan, terutama yang ditujukan untuk revisi dokumen pada tahun 2014. Tidak ada bukti adanya konsultasi yang bermakna dengan masyarakat lokal atau organisasi masyarakat sipil yang bekerja di wilayah proyek itu sendiri. Kurangnya pemahaman lokal akan proyek dan kurangnya rasa kepemilikan terhadap proyek menyebabkan munculnya keprihatinan yang serius, dan kekurangan ini kemungkinan akan memunculkan masalah selama pelaksanaan proyek.

[Kurangnya persyaratan-persyaratan yang jelas](#)

Sementara Dana Carbon FCPF (Rangkuman dari pimpinan pertemuan) telah meminta pemerintah DRC untuk “menjelaskan bagaimana Program ER (di masa depan) akan memberikan kontribusi bagi kemajuan menuju penjelasan akan penguasaan lahan dan sumber daya di daerah penghitungan...”, badan ini tidak menuntut revisi tertentu apapun dari dokumen ER-PIN ini. Resolusi Dana Karbon (no.2) tidak menyebutkan secara eksplisit tentang isu-isu sosial dan hak-hak, meskipun resolusi ini mensyaratkan kesesuaian dengan Kerangka Metodologis Dana Karbon. Meskipun kerangka ini mengacu pada pengaman sosial, kerangka ini juga dikri-

tik karena terlalu menitikberatkan pada manfaat karbon dan mengandung insentif yang buruk untuk nasionalisasi cadangan karbon hutan.

Dari pihak pemerintah, pemerintah DRC telah berjanji untuk menangani keprihatinan CSO tentang ER-PIN ini, mempertahankan moratorium konsesi penebangan industri dan mengambil tindakan untuk menyelesaikan Keputusan Komunitas Kehutanan yang prosesnya terhenti sejak tahun 2010. NGO lokal dan komunitas lokal kini tengah berusaha untuk terus mendorong pemerintah untuk menepati janjinya itu.

Organisasi-organisasi internasional, termasuk FERN dan FPP, akan terus mengawal proses ini untuk menilai kepatuhan dengan komitmen sosial dan standar-standar yang disepakati oleh FCPF dan inisiatif-inisiatif REDD terkait dari Program Investasi Hutan (FIP) dan Program UN-REDD.

[Salinan dari briefing FERN-FPP bisa didapat di sini](#)

Tom Griffiths

5. Mewujudkan Hak-Hak Perempuan Adat: sebuah alat baru untuk membantu perjuangan

FPP serta [Tebtebba Foundation](#) dan [Asian Indigenous Women's Network \(AWIN\)](#) dengan senang hati menghadirkan sebuah panduan yang baru diterbitkan bersama yang bertajuk "[Mewujudkan Hak-Hak Perempuan Adat: sebuah panduan tentang CEDAW](#)". Panduan ini resmi dirilis pada tanggal 8 Maret untuk memperingati Hari Perempuan Internasional.

Panduan tersebut berupaya mendukung organisasi-organisasi perempuan adat dan komunitas-komunitas di Asia untuk memahami bagaimana hukum internasional dan proses hukum internasional dapat digunakan untuk mendukung perjuangan di tingkat lokal dan nasional. Selain berfokus pada CEDAW, panduan ini juga menjajaki mekanisme-mekanisme hukum lainnya, termasuk badan-badan perjanjian (treaty bodies) lainnya, baik yang dirancang untuk melindungi hak-hak perempuan dan yang dirancang untuk melindungi hak-hak masyarakat adat. Publikasi ini dapat diunduh secara gratis, dan juga tersedia secara gratis untuk organisasi-organisasi masyarakat adat.

<http://www.forestpeoples.org/topics/gender-issues/publication/2014/realizing-indigenous-women-s-rights-cedaw-and-indigenous-women>

Helen Tugendhat

6. Masyarakat adat berkumpul untuk mewujudkan pembangunan yang mereka tentukan sendiri

Dalam sebuah acara pelatihan baru-baru ini di Sagada, Filipina, tokoh-tokoh muda dari masyarakat adat dan organisasi adat di 25 negara berkumpul untuk meneliti dan membahas kebijakan pengaman dan mekanisme keluhan milik lembaga-lembaga keuangan internasional. Di akhir acara pelatihan, para peserta mengeluarkan sebuah pernyataan kepada pihak Bank yang menyerukan adanya penghormatan dan perlindungan atas hak-hak mereka untuk menentukan arah pembangunan mereka sendiri.

Pernyataan yang lengkap tersedia untuk dukungan dari Anda dan informasi lebih lanjut dapat ditanyakan kepada Robeliza Halip dari Asia Indigenous Peoples Pact (robie@aippnet.org)

[Rilis pers \(hanya tersedia dalam bahasa Inggris\)](#)

Pernyataan (dalam bahasa [Spanyol](#) dan [Inggris](#))

Helen Tugendhat